



COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MEKAR SARI DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN SUKARATU KABUPATEN TASIKMALAYA

Meliani

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

Email: Koswaraputrimeliani29@gmail.com

ABSTRAK

Collaborative Governance dalam pelaksanaan BUMDes, diidentifikasi sebagai keterlibatan beberapa *stakeholder* baik Lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah yang bekerjasama agar mencapai tujuan pelaksanaan BUMDes supaya jauh lebih efektif, daripada organisasi secara mandiri, selain itu, berbagai kepentingan *stakeholders* akan mudah terakomodir dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis *Collaborative Governance* dalam BUMDes Mekar Sari di Desa Gunungsari Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Ansell dan Gash, yang dimana dalam teori Ansell dan Gash terdapat 4 Dimensi penting dalam *Collaborative Governance*, yaitu : (a) Kondisi awal (b) Desain Kelembagaan (c) Kepemimpinan Fasilitatif (d) Proses kolaborasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam BUMDes Mekar Sari belum berjalan dengan maksimal hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa dimensi mengenai *Collaborative Governance* yang belum tercapai, seperti: (1) Terdapat permasalahan pada kondisi awal pengelolaan BUMDes Mekar Sari (2) Kurang maksimalnya peran direktur BUMDes Mekar Sari dalam berkolaborasi. Hal tersebut yang menjadi faktor kurang maksimalnya *Collaborative Governance* dalam BUMDes Mekar Sari di Desa Gunungsari Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.

Kata kunci : *Collaborative Governance*, Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa

ABSTRACT

Collaborative Governance in the implementation of BUMDes is identified as the involvement of several stakeholders, both Government and non-Governmental Institutions who work together to achieve the objectives of implementing BUMDes so that it is much more effective, than an independent organization, in addition, various stakeholder interests will be easily accommodated in its implementation. This study aims to determine, describe and analyze *Collaborative Governance* in BUMDes Mekar Sari in Gunungsari Village, Sukaratu District, Tasikmalaya Regency. This research approach uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques using the method of observation, interviews, literature study, and documentation. The theory used in this study is the theory of Ansell and Gash, where in the Ansell and Gash theory there are 4 important dimensions in *Collaborative Governance*, namely: (a) Starting conditions (b) Institutional Design (c) Facilitative Leadership (d) Collaborative process. The results of this study indicate that the collaborative governance of BUMDes Mekar Sari has not run optimally this is because there are still several dimensions regarding *Collaborative Governance* that have not been achieved, such as: (1) There are problems in the initial conditions of the management of BUMDes Mekar Sari (2) Less than the maximum role director of BUMDes Mekar Sari in collaborating. This is a factor in the lack of optimal collaboration management in the Mekar Sari BUMDes in Gunungsari Village, Sukaratu District, Tasikmalaya Regency.

Keywords: *Collaborative Governance*, Village Owned Enterprise Governance

PENDAHULUAN

Strategi pemerintah yang dilakukan untuk memudahkan Desa dalam pemanfaatan potensi dan ekonomi masyarakat yaitu dengan mendirikan BUMDes berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, hal ini juga disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pasal 213 ayat 1,

pemerintah daerah. Isi undang-undang menegaskan janji kepuasan permintaan dalam konteks pembangunan tingkat desa.

Pembentukan BUMDes harus menjadi upaya membangun kapasitas dan didorong oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi lembaga-lembaga tersebut. Maka, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah merilis Perda Tentang BUMDes yang diatur dalam Peraturan Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes), sehingga desa-desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya dengan mendirikan BUMDes mengacu pada peraturan daerah.

Pembentukan BUMDes merupakan tambahan dari pengelolaan aset, potensi, sumber daya dan peningkatan ekonomi masyarakat desa setempat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah BUMDes juga dibuat dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan mengembangkan potensi ekonomi di daerah pedesaan untuk mendorong perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan secara keseluruhan dan menciptakan lapangan kerja.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai kesuksesan pengelolaan BUMDes untuk mencapai keberhasilannya dibutuhkan teknik organisasi yang dapat menggerakkan keterlibatan masyarakat dalam berperan aktif di kegiatan BUMDes. Dibutuhkan gotong royong secara maksimal antar berbagai pihak diantaranya pemerintah, masyarakat, dan swast, hal tersebut dapat diartikan sebagai penerapan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya bahwa saat ini jumlah BUMDes di kabupaten Tasikmalaya sebanyak 351 yang berasal dari 39 Kecamatan. Dengan rincian 270 BUMDes aktif dan 81 BUMDes pasif dari jumlah keseluruhan 351 BUMDes di kabupaten tasikmalaya, dalam data tersebut kecamatan sukaratu merupakan kecamatan dengan angka terkecil jumlah BUMDes yang aktif diantara 38 kecamatan lainnya. Hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian di kecamatan sukaratu tentang bagaimana pengelolaan BUMDes di kecamatan sukaratu sehingga menyebabkan kecamatan sukaratu adalah pemilik angka terkecil jumlah BUMDes yang aktif. Hal inilah yang menjadikan alasan BUMDes di Kecamatan Sukaratu di pilih sebagai objek penelitian.

Adapun data detail BUMDes di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan statusnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data BUMDes Kecamatan Sukaratu

No	Nama Desa	Nama BUMDes	Jenis Usaha	Status BUMdes
1	Gunungsari	Mekar Sari	Unit Jasa BRILink, Perdagangan Umum, Budidaya Ikan, Jasa Penyediaan Air Bersih, Unit Jasa Sewa Tabung Gas LPJ, Desa Wisata	Aktif
2	Tawangbanteng	Tawangbanteng	Perdagangan, Penyewaan, Permodalan, Jasa Perantara	Pasif

3	Sukaratu	Karya Mandiri	-	Pasif
4	Sukamahi	Sukamahi	Fotocopy, Alat Tulis, Penyewaan Tenda	Pasif
5	Sukagalih	Sukagalih	-	Pasif
6	Linggajati	Tigalunggun	Unit Jasa BRILink, Kedai Kopi	Aktif
7	Sinagar	Bina Usaha Mandiri Sinagar	Jasa Umum, Penyediaan Gas LPJ, Budidaya Domba Garut	Aktif
8	Indrajaya	Djayadisastra	Jasa Umum, Unit Jasa BRILink	Aktif

(Sumber : Kantor Kecamatan Sukaratu , (Diolah Peneliti,2022))

Berdasarkan data diatas, dari 8 BUMDes di 8 Desa terdapat 4 BUMDes yang Aktif dan 4 BUMDes yang Pasif. Dari 8 BUMDes yang terdapat di Kecamatan Sukaratu, Penulis tertarik melakukan penelitian di BUMDes Mekar Sari yang berada Di Desa Gunungsari, selain BUMDes Mekar Sari adalah salah satu BUMDes Aktif di Kecamatan Sukaratu, dapat dilihat juga bahwa jenis usaha yang terdapat di BUMDes Mekar Sari lebih banyak dibandingkan dengan BUMDes aktif lainnya. Sehingga hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk meneliti bagaimana pengelolaan BUMDes Mekar Sari di Desa Gunungsari tersebut.

Sedikit ulasan mengenai kesuksesan BUMDes Mekar Sari dalam Bidang Budidaya Ikannya, melalui usaha di Bidang Budidaya Ikan BUMDes Mekar Sari mampu mewadahi dan memfasilitasi para petani ikan di wilayah Desa Gunungsari yang kurang mampu memodali kolam ikannya tersebut sehingga BUMDes mengajak kerjasama petani pemilik kolam ikan tersebut untuk membudidayakan ikan, maka dalam bidang budidaya tersebut melibatkan beberapa *stakeholder* yakni : (a) Pengelola BUMDes bagian divisi perikanan (b) Petani ikan (c) Distributor pakan dan obat-obatan ikan (d) Pengepul hasil panen ikan, yang untuk saat ini peran *stakeholder* diatas cukup bersinergi sehingga upaya BUMDes Mekar Sari tersebut mampu mendorong perekonomian masyarakat khususnya penghasilan para petani ikan di Desa Gunungsari.

Sesuai dengan data yang terdapat dalam laporan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Sari di Desa Gunungsari Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, serta Program dan presentase tingkat pencapaian BUMDes Mekar Sari di Desa Gunungari Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, maka diperoleh data yaitu sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.2
Laporan Usaha BUMDes Mekar Sari di Desa Gunungsari Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya

No	Jenis Usaha	Kategori	Tingkat Pencapaian (%)
1	Jasa BRILink	Tidak Berkembang	-
2	Perdagangan Umum	Tidak Berkembang	-
3	Budidaya Ikan	Berkembang	60%
4	Jasa Penyediaan Air Bersih	Berkembang	45%
5	Desa Wisata	Berkembang	15%

6	Jasa Sewa Tabung Gas LPJ	Tidak Berkembang	-
---	--------------------------	------------------	---

(Sumber : BUMDes Mekar Sari Desa Gunungsari (Diolah Peneliti, 2022))

Berdasarkan data di atas terdapat 6 program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Mekar Sari Desa Gunungsari, dari banyaknya program BUMDes di Desa Gunungsari Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya baru ada 3 Program yang terealisasi, yaitu Budidaya ikan dengan tingkat pencapaian 60% , Jasa Penyediaan Air Bersih dengan tingkat pencapaian 45% dan Desa Wisata dengan tingkat pencapaian 15%. Hal tersebut dikarenakan proses kolaborasi pada pengelolaan BUMDes Mekar Sari belum maksimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fenomena mengenai *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan BUMDes Mekar Sari di Desa Gunungsari yaitu meliputi:

1. Masih ada hambatan terjadi di kondisi awal dalam pengelolaan BUMDes Mekar Sari, hambatan tersebut yaitu sebagai berikut:
 - a. Hambatan dalam awal mula pembentukan BUMDes Mekar Sari yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang memumpuni baik dari segi kualitas ataupun kuantitas untuk dijadikan pengelola BUMDes Mekar Sari;
 - b. Hambatan dari kerjasama yang belum tuntas yang dilakukan oleh pengurus BUMDes yang terdahulu, mengenai kerjasama di bidang usaha jasa penyediaan air bersih.
2. Ketidaksihinggaan Pengelolaan BUMDes Mekar Sari seperti yang tercantum AD-ART yang telah ditentukan, berikut pasal yang tidak sesuai yaitu:

Dalam AD-ART BAB II Pasal 2 poin (f) tentang hak pegawai BUMDes Mekar Sari yang dimana pegawai BUMDes Mekar Sari berhak mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas; baik dalam tata kelola administratif atau pengembangan usaha BUMDes; hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang dimana kenyataannya tidak adanya fasilitas yang menyediakan pelatihan peningkatan kapasitas pegawai BUMDes Mekar Sari.
3. Peran Ketua BUMDes Mekar Sari yang kurang memfasilitasi proses kolaborasi dalam mensukseskan proker BUMDes Mekar Sari yang dimana seorang ketua BUMDes berperan dalam memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan untuk duduk di meja perundingan, bertatap muka, membangun rasa saling percaya, berkomitmen, membuat rencana stategi dan tujuan bersama yang disepakati bersama, namun pada kenyataannya peran tersebut belum muncul dari ketu BUMDes Mekar Sari ini sehingga peran ketua BUMDes dalam pengelolaan BUMDes Mekar Sari kurang maksimal.
4. Kurangnya keterlibatan dari berbagai pihak baik pihak Pemerintah Desa Gunungsari, pihak Masyarakat Desa Gunungsari, serta pihak Swasta dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan BUMDes Mekar Sari untuk merealisasikan program BUMDes Mekar Sari di Desa Gunungsari Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Collaborative Governance diawali dengan adanya ketergantungan antar *stakeholder* dalam menyelesaikan permasalahan pada kebijakan publik melalui beberapa tahapan proses kolaboratif untuk menyelesaikan permasalahan kompleks yang terjadi di masyarakat.

Adapun model *Collaborative Governance* menurut Ansell & Gash dalam jurnal mereka *Collaborative Governance in Theory and Practice* merumuskan model tata kelola kolaboratif berdasarkan tinjauan pustaka. Kesimpulan penelitian ini dijelaskan dalam 4 (empat) variabel utama, yaitu:

1. Kondisi Awal
2. Desain Kelembagaan
3. Kepemimpinan Fasilitatif
4. Proses Kolaboratif

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan bertumpu pada pendekatan kualitatif. Dimana dengan metode ini secara komprehensif dapat mengungkapkan bagaimana proses kegiatan tertentu secara komprehensif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Metode penelitian kualitatif digunakan sesuai dengan karakteristik yang ada di lokasi penelitian melalui observasi (pengamatan) dan partisipasi peneliti. Penggunaan metode penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih bagi penulis untuk mengkaji objek penelitian.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. (Sugiyono, 2017, hal. 9)

Dalam Penelitian ini peneliti memilih dan menetapkan informan untuk penelitian *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan BUMDes Mekar Sari di Desa Gunungsari Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa Gunungsari
2. Direktur BUMDes Mekar Sari
3. Anggota BUMDes Mekar Sari
4. Pengawas BUMDes Mekar Sari
5. Masyarakat Desa Gunungsari

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian mengenai *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan BUMDes Mekar Sari Di Desa Gunungsari Kecamatan Sukaratu peneliti mengacu pada teori Ansell dan Gash, yang menyatakan terdapat 4 Dimensi dalam *Collaborative Governance*/Pengelolaan Kolaborasi, adapun 4 Dimensi yang perlu di perhatikan dalam *Collaborative Governance* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi awal

kondisi awal merupakan situasi penentu bagaimana alur majunya suatu instansi ataupun organisasi, yang dimana jika terdapat permasalahan pada kondisi awal seperti yang BUMDes Mekar Sari Desa Gunungsari alami, seperti permasalahan pada: (a) Kurangnya transparansi pemangku kepentingan dalam proses awal mula pembentukan BUMDes



Mekar Sari Desa Gunungsari (b) Tidak Mumpuninya Sumber Daya Manusia Pada pengelolaan BUMDes Mekar Sari, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (c) Kurang transparansi dan kolaborasi para pengurus BUMDes dengan pihak masyarakat dan juga pihak pemerintah maupun swasta dalam menjalankan visi dan misi ataupun program kerja BUMDes pada saat itu. Permasalahan tersebut menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan BUMDes pada saat itu, sehingga kondisi awal pada BUMDes Mekar Sari ini dijadikan acuan oleh Pemerintah Desa Gunungsari dan juga Pengurus BUMDes Mekar Sari yang baru untuk meningkatkan pengelolaan BUMDes melalui *Collaborative Governance* dalam merealisasikan visi dan misi juga program kerja BUMDes Mekar Sari Desa Gunungsari Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.

2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan di sini mengacu pada protokol dasar dan aturan dasar untuk kolaborasi atau yang mengatur cara mengelola lembaga atau organisasi, dan bagaimana aturan dasar dalam melakukan pengelolaan kolaborasi.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai Dimensi Desain Kelembagaan yang terdapat 2 indikator yang harus diperhatikan yaitu : (a) Aturan dasar Tata Kelola (b) Pedoman tata kelola kolaborasi/kerjasama. Di dalam BUMDes Mekar Sari Desa Gunungsari kedua indikator dalam dimensi Desain Kelembagaan ini sudah terpenuhi namun terdapat satu aturan tata kelola yang belum dilaksanakan oleh pengurus BUMDes Mekar Sari mengenai pasal yang terdapat dalam AD-ART BUMDes Mekar Sari yaitu dalam BAB II Pasal 2 poin (f) Tentang hak pegawai BUMDes dalam mendapatkan pelatihan kapasitas pegawai baik dalam aturan tata kelola administratif ataupun pengembangan usaha BUMDes, hal ini dikarenakan belum adanya informasi mengenai program pelatihan tersebut dari pemerintah daerah kabupaten Tasikmalaya yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang memegang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tasikmalaya.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam dimensi Kepemimpinan Fasilitatif ini peneliti mengukur melalui 3 indikator yaitu : (a) Peran Pemimpin dalam berkolaborasi (b) Partisipasi Pemimpin dalam proses berkolaborasi (c) Sikap pemimpin dalam memfasilitasi proses berkolaborasi.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai dimensi Kepemimpinan Fasilitatif, bahwasannya direktur BUMDes Mekar Sari yang berperan sebagai pemimpin dalam *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan BUMDes Mekar Sari, masih kurang optimal baik dalam segi peran, partisipasi dan juga sikap dalam memimpin kolaborasi dalam pengelolaan BUMDes Mekar Sari. Sikap yang dilakukan direktur BUMDes Mekar Sari juga menyimpang pada tugas direktur yang sudah diatur dalam AD-ART BUMDes Mekar Sari.

4. Proses Kolaborasi

Awal dari proses kolaborasi sangat sulit untuk menentukan dari mana ia akan memulai. Dalam meneliti mengenai Dimensi Proses Kolaborasi yang terdapat pada *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan BUMDes Mekar Sari Desa Gunungsari, mengukur Dimensi ini melalui 4 indikator penting yang harus diperhatikan dalam proses Kolaborasi

tersebut, yaitu : (a) *Stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi (b) Langkah Awal Kolaborasi (c) Peran *Stakeholder* (d) Hasil Sementara.

Dari semua pembahasan mengenai Dimensi Proses Kolaboratif yang didalamnya terdapat 4 indikator penting yaitu (a) *Stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi (b) Langkah Awal Kolaborasi (c) Peran *Stakeholder* (d) Hasil Sementara. Keempat indikator tersebut sudah berjalan dengan baik, dimana dalam proses kolaborasi terdapat 2 *stakeholder* yang terlibat pada *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan BUMDes, yaitu pihak Pemerintah Desa, dan Pihak Masyarakat Desa Gunungsari, langkah awal yang dilakukan dalam berkolaborasi melalui pertemuan dan sosialisasi dengan pihak yang terlibat, dan peran *stakeholder* yang terlibat berperan dengan baik sesuai dengan bidang yang dikelolanya sehingga hasil sementara pada proses kolaborasi pengelolaan BUMDes Mekar Sari berjalan dengan baik dan kemungkinan besar akan terus dilakukan.

Dari penjelasan diatas bahwa *Collaborative Governance* dalam BUMDes Mekar Sari yang mengacu pada teori dari Ansell dan Gash yang menyebutkan terdapat 4 Dimensi penting dalam *Collaborative Governance* Yaitu: (a) Kondisi Awal/*Starting Conditions* (b) Desain Kelembagaan/*Instutional Design* (c) Kepemimpinan Fasilitatif/*Facilitative Leadership* (d) Proses Kolaborasi/*Collaborative Process*, ternyata belum semua Dimensi berjalan dengan baik, karena masih terdapat permasalahan dalam setiap Dimensi tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
Hasil Pembahasan

No	Dimensi <i>Collaborative Governance</i>	Hasil
1	Kondisi Awal	Kurang Baik
2	Desain Kelembagaan	Cukup Baik
3	Kepemimpinan Fasilitatif	Kurang Baik
4	Proses Kolaboratif	Baik

I. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil dari pembahasan mengenai *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan BUMDes Mekar Sari berdasarkan teori dari Ansell dan Gash yang menyebutkan bahwa terdapat 4 dimensi utama dalam *Collaborative Governance* Yaitu:

1. Kondisi Awal/*Starting Conditions*

Kondisi awal pada *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan BUMDes Mekar Sari Desa Gunungsari terdapat permasalahan yaitu mengenai tidak mumpuninya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan BUMDes Mekar Sari baik dari segi kualitas ataupun kuantitas, hal tersebut yang menjadi hambatan pada *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan BUMDes Mekar Sari, sehingga kondisi awal ini memicu keinginan pihak-

pihak yang terlibat untuk berkolaborasi, baik dari pemerintah Desa Gunungsari maupun pihak lain untuk terlibat dalam Tata Kelola Kolaboratif dalam pengelolaan Bumdes Mekar Sari Desa Gunungsari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya.

2. Desain Kelembagaan/*Institutional Design*

Dimensi Desain Kelembagaan ini sudah terpenuhi mulai dari sudah dibentuknya aturan dasar pengelolaan BUMDes dan juga pedoman tata kelola kerjasama BUMDes Mekar Sari, meskipun masih terdapat satu pasal yang belum dijalankan oleh pihak BUMDes Mekar Sari mengenai hak pegawai dalam pelatihan peningkatan kapasitas kinerja yang berdampak pada pengelolaan BUMDes Mekar Sari Desa Gunungsari Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.

3. Kepemimpinan Fasilitatif/*Facilitative Leadership*

Dimensi ini belum berjalan dengan baik karena ada beberapa permasalahan mengenai peran, partisipasi dan juga sikap direktur BUMDes dalam Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengelolaan Bumdes Kelurahan BUMDes Mekar Sari Gunungsari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya.

4. Proses Kolaborasi/*Collaborative Process*

Mengenai Dimensi Proses Kolaboratif sudah berjalan dengan baik, dimana dalam proses kolaborasi terdapat 2 *stakeholder* yang terlibat dalam *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan BUMDes, yaitu pihak Pemerintah Desa, dan Pihak Masyarakat Desa Gunungsari, namun masih kurangnya keterlibatan dari pihak swasta sebagai investor yang dimana dapat memudahkan suksesnya *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan BUMDes Mekar Sari di Desa Gunungsari Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi, P. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian (S. Meita (Ed.)). Ar-Ruzz Media.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (N.D.). Sampul Collaborative Governance.
- Gusnardi, A. Hasan. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian. Taman Karya.
- Habibah, E. N. (2021). Collaborative Governance Konsep & Praktik. Pustaka Rumah Cinta.
- Pranowo, G. (2021). Monograf Pengelolaan Pembelajaran (S. Fauziyah (Ed.)). Penerbit Lakeisha.
- Prasetya, E. (2020). Inspirasi Sektor Usaha Bumdes. Hijaz Pustaka Mandiri.
- Prasetyo, D. (2019). Peran Bumdes Dalam Membangun Desa (Claudia (Ed.)). Cv Derwati Press.
- Putra. (2012). New Public Governance. Universitas Brawijaya Press (Ub Press).
- Solekhan. (2014). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Setara Press.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta, Cv.
- Wijaya, D. (2018a). Bum Desa Badan Usaha Milik Desa. Gava Media.
- Yanuar, I. (2012). Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Pt Refika Aditama.
- Revida, E., Aisyah, S., Pardede, anita florance, Ourba, S., Hidayatuloh, a. nururrochman, Leuwol, natasya virginia, SN, A., Kato, I., Silalahi, M., & Manullang, sardjana orba. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.

Jurnal

Alfiah, S., Andriani, J., Lesmana, R., Sunardi, N., & Furyanah, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Desa Wisata Pada Desa Cimanggu, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Pada Curug Paok dan Bukit Pasir Jaka). *Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1), 21–28.

Ansell, G. (2008). Collaborative Governance theory and practice. *collaborative governance theory and practice*.

Luh ni, D. yulyana. (2019). Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2(2).
<https://journal.undiknas.ac.id>

Samadi, Rahman, A., & Afrizal. (2015). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal*, 2(1)